

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KASUS DI SMKS MAHARDHIKA SURABAYA)

Noer Adila Azzahra^{1*}, Rezki Nurma Fitria², Supriyanto³, Karwanto⁴, Kaniati Amalia⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Negeri Surabaya

Email: noer.22033@mhs.unesa.ac.id*

Article History	Received	Accepted	Published
	2025-11-18	2025-12-02	2025-12-05

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) di SMKS Mahardhika Surabaya, mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat. Metode yang digunakan adalah kualitatif studi kasus dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta analisis tematik menggunakan perangkat lunak NVivo 15 dengan kerangka POAC (planning, organizing, actuating, controlling). Temuan menunjukkan bahwa; (1) perencanaan belum didukung kebijakan tertulis khusus SPMB inklusif; (2) pengorganisasian belum menetapkan pembagian tugas panitia secara formal; (3) pelaksanaan meliputi identifikasi kebutuhan melalui wawancara, placement test untuk penentuan jurusan, dan diagnosis hasil, namun adaptasi asesmen dan pelibatan tenaga ahli belum dilakukan; (4) pengawasan bersifat reflektif, belum terstruktur; (5) faktor yang mendukung berupa komitmen pihak sekolah dalam penerimaan yang inklusif; (6) faktor yang menghambat berupa belum tersedianya panduan tertulis penerimaan, belum tersedia Guru Pendamping Khusus (GPK), belum ada adaptasi asesmen khusus, serta belum melibatkan tenaga ahli dalam proses asesmen dan diagnosis. Sekolah telah menunjukkan niat dan langkah awal untuk penerimaan inklusif, namun masih memerlukan penguatan dalam menunjang implementasi SPMB yang lebih sistematis seperti penyusunan SOP SPMB inklusif, pembentukan tim asesmen lintas profesi, perekrutan GPK, dan pelatihan bagi panitia khusus.

Kata Kunci: asesmen, PDPD, pendidikan inklusi, SPMB

Abstract

This study aims to examine the process of the New Student Admission System (NSAS) for Students with Disabilities (SWD) at SMKS Mahardhika Surabaya, including planning, organizing, implementation (including initial assessment and diagnosis), and evaluation, as well as identifying supporting and inhibiting factors. The methods used were qualitative case studies with data collection through interviews, observations, and documentation, as well as thematic analysis using NVivo 15 software with the POAC (planning, organizing, actuating, controlling) framework. The findings show that; (1) planning has not been supported by a special written policy for inclusive NSAS; (2) the organization has not formally determined the division of committee duties; (3) implementation includes identification of needs through interviews, placement tests for the determination of majors, and diagnosis of results, but the adaptation of assessments and the

involvement of experts has not been carried out; (4) supervision is reflective, unstructured; (5) supporting factors in the form of the school's commitment to inclusive admission; (6) inhibiting factors in the form of the unavailability of written guidelines for admission, the lack of a Special Assistant Teacher (SAT), the lack of adaptation of special assessments, and the involvement of experts in the assessment and diagnosis process. The school has shown its intention and initial steps for inclusive admission, but it still needs to be strengthened in supporting a more systematic implementation of NSAS such as the preparation of inclusive NSAS SOPs, the formation of cross-professional assessment teams, SAT recruitment, and training for special committees.

Keywords: *assessment, inclusive education, NSAS, SWD*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif merupakan komitmen universal untuk menjamin akses pendidikan yang setara bagi seluruh individu, termasuk individu dengan disabilitas. Laporan *World Health Organization* (WHO, 2023), memperkirakan sekitar 1,3 miliar orang di dunia adalah disabilitas. Fakta tersebut menegaskan pentingnya penyediaan pendidikan yang ramah akses dan adaptif pada seluruh jenjang. Sejalan dengan hal tersebut, *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO, 2023) juga menegaskan hak setiap individu atas pendidikan yang berkualitas dan nondiskriminatif, sebagaimana tercantum dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* target 4.5 tentang penyediaan pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas.

Indonesia merespons melalui beragam regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjamin hak setiap individu dengan disabilitas, termasuk memperoleh pendidikan pada seluruh jenis, jenjang dan jalur pendidikan secara inklusif dan khusus. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada aspek pemerataan dan kesiapan kelembagaan. Sekolah Luar Biasa (SLB) memang dirancang untuk menyediakan layanan khusus dengan dukungan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai. Akan tetapi, model segregatif ini dinilai membatasi interaksi sosial antara Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) dan peserta didik reguler, sehingga kurang mendukung terbentuknya lingkungan belajar yang inklusif (Al-Nur, 2023).

Sebagai upaya perbaikan, pemerintah mengembangkan sistem pendidikan inklusif untuk menjamin hak belajar setara bagi PDPD di sekolah reguler (Juntak et al., 2023). Regulasi terbaru melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, mempertegas kewajiban setiap satuan pendidikan untuk mengakomodasi dan memfasilitasi kebutuhan belajar PDPD. Dalam pelaksanaannya, keberadaan Guru Pendamping Khusus (GPK) menjadi komponen penting dalam mendukung layanan pendidikan inklusif (Zakiah, 2021).

Di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), implementasi pendidikan inklusif masih belum optimal. Penelitian Wiratrianida & Sujarwanto (2024) menunjukkan proses penerimaan PDPD di jenjang ini sering kali belum memperhatikan keragaman kebutuhan peserta didik. Hambatan utama mencakup minimnya pelatihan bagi guru, ketiadaan asesmen awal yang adaptif, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Padahal, tahap

penerimaan merupakan bagian awal dari fungsi perencanaan dalam manajemen peserta didik, yang seharusnya mampu memastikan kesesuaian antara karakteristik calon peserta didik dan layanan pendidikan yang disiapkan.

Di Kota Surabaya, pendidikan inklusif mulai diterapkan sejak tahun 2009, akan tetapi regulasi daerah tentang pendidikan Inklusif baru ditetapkan sejak tahun 2011 melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011. Namun, pemerataan pelaksanaannya masih menjadi tantangan. Banyak sekolah telah membuka akses bagi PDPD, tetapi belum memiliki sistem penerimaan yang terstruktur dan belum melibatkan tenaga ahli seperti psikolog atau dokter spesialis pada tahap identifikasi awal (Nurrachman & Nugroho, 2022; Utari et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi perencanaan dan pengorganisasian dalam manajemen peserta didik belum berjalan optimal, khususnya dalam menyiapkan mekanisme penerimaan yang sistematis dan berbasis asesmen komprehensif.

SMKS Mahardhika Surabaya merupakan sekolah kejuruan swasta yang mulai membuka akses pendidikan bagi PDPD sejak tahun ajaran 2023/2024. Sekolah memiliki lima program keahlian: Animasi, Akuntansi, Desain Komunikasi Visual, Manajemen Perkantoran, serta Produksi dan Siaran Program Televisi. Hingga kini telah diterima enam PDPD, dua dengan disabilitas sensorik pendengaran dan empat lainnya dengan disabilitas intelektual (lamban belajar). Studi pendahuluan melalui wawancara dengan guru Bimbingan Konseling (BK) yang juga merupakan panitia SPMB pada 19 Februari 2025 lalu, diketahui bahwa proses penerimaan menggunakan asesmen umum berupa tes akademik dasar (matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan pendidikan kewarganegaraan) serta tes kejuruan sesuai minat. Belum terdapat prosedur tertulis atau mekanisme asesmen yang disesuaikan dengan karakteristik PDPD.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) bagi PDPD di SMKS Mahardhika Surabaya dengan menelaah tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan (termasuk asesmen awal dan diagnosis), hingga evaluasi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan SPMB bagi PDPD. Dengan demikian, penelitian ini ditempatkan dalam kerangka manajemen peserta didik, yang berupaya menganalisis implementasi fungsi manajemen dalam konteks penerimaan peserta didik penyandang disabilitas di sekolah kejuruan swasta.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di SMKS Mahardhika Surabaya pada bulan Juni hingga Juli 2025. Ruang lingkup metodologis penelitian ini terbatas pada tahapan penerimaan peserta didik, dan tidak mencakup proses pembelajaran setelahnya. Penelitian kualitatif dengan desain studi kasus dipilih untuk menggali fenomena kontekstual proses SPMB bagi PDPD pada satu satuan pendidikan kejuruan swasta. Studi kasus digunakan untuk menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata ketika batas fenomena atau konteks tidak tegas (Yin, 2009) dan untuk menyajikan narasi kaya tentang proses serta interaksi aktor kebijakan (Creswell & Poth, 2018).

Sumber data meliputi stakeholder dalam proses SPMB bagi PDPD, pengamatan melalui simulasi, dan dokumen pendukung. Pemilihan informan menggunakan *purposive*

sampling berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam proses SPMB. Triangulasi sumber dilakukan untuk memperoleh keberagaman perspektif, sebagaimana dianjurkan oleh Lincoln & Guba (1985). Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: (1) wawancara mendalam semi-terstruktur yang melibatkan sembilan subjek penelitian sebagai informan kunci dan terdiri dari satu subjek sebagai Kepala Sekolah (KS), dua Panitia SPMB (PS), dua Guru BK (BK), dua Guru Reguler (GR), dan satu Wali PDPD (OT/W), serta satu PDPD itu sendiri (PDPD); (2) observasi dilakukan dengan mengamati proses pendaftaran SPMB dan pengecekan terhadap dokumen arsip sekolah mengenai data dari PDPD; dan (3) studi dokumentasi terhadap tujuh dokumen yang meliputi pamflet, formulir pendaftaran, formulir *placement test*, hasil *placement test*, notulensi rapat, susunan panitia, dan biodata PDPD, serta beberapa foto kegiatan.

Peneliti berperan sebagai instrumen utama dengan dukungan pedoman pengambilan data yang disusun dan dikembangkan berdasarkan fokus serta tujuan penelitian. Proses analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak NVivo 15 untuk mempermudah pengelolaan dan pengkodean data kualitatif. Analisis data dilakukan secara induktif dan tematik melalui tahap-tahap: transkripsi data, pembacaan menyeluruh, pengkodean, pengelompokan tema, dan interpretasi hasil. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola hubungan antar kategori serta menginterpretasikannya secara deskriptif sesuai dengan kerangka teori dan konteks penelitian (Bazeley & K. Jackson, 2015).

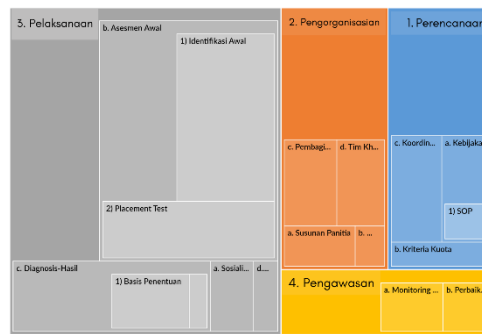
Keabsahan data dijaga melalui lima teknik utama; triangulasi sumber dan teknik (wawancara, observasi, dokumentasi); *member checking* (ringkasan hasil/temuan tematik dikonfirmasi kepada perwakilan informan); *audit trail* (dokumentasi rinci terhadap seluruh proses pengumpulan dan analisis data); ketekunan pengamatan (keterlibatan peneliti secara intensif dalam aktivitas lapangan); *peer debriefing* (diskusi dengan pembimbing dan rekan sejawat untuk menjaga objektivitas hasil penelitian).

Penelitian ini memperoleh persetujuan etik dari SMKS Mahardhika Surabaya (Nomor: 013/SMK.C.7/MH/SBY/2025, Tanggal: 24 Juli 2025). Seluruh partisipan menandatangani *informed consent*; untuk peserta didik dengan disabilitas, izin diperoleh langsung dari PDPD, wali, dan pihak sekolah. Identitas disamarkan, data disimpan aman, dan akses dibatasi pada tim penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses SPMB bagi PDPD di SMKS Mahardhika Surabaya, dianalisis menggunakan kerangka fungsi manajemen; *Planning, Organizing, Actuating, Controlling (POAC)*. SPMB merupakan salah satu kegiatan inti dalam manajemen peserta didik, khususnya pada fungsi perencanaan dan pengorganisasian, yang menentukan bagaimana sekolah menetapkan kebijakan, menyiapkan mekanisme penjangkaran, serta menempatkan peserta didik berdasarkan kebutuhan dan potensinya.

Fungsi Manajemen dalam SPMB bagi PDPD



Gambar 1. Chart Fungsi Manajemen SPMB

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh visualisasi hubungan antar kategori utama proses penerimaan PDPD di SMKS Mahardhika Surabaya. Tahap pelaksanaan tampak mendominasi dengan porsi referensi paling besar dibandingkan tahap lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kegiatan penerimaan menjadi fokus utama sekolah. Sedangkan pengawasan dengan *node* terkecil berperan memastikan keberlanjutan dan evaluasi proses penerimaan secara keseluruhan.

Perencanaan (*Planning*)

Tema “Perencanaan” dalam proses SPMB bagi PDPD di SMKS Mahardhika Surabaya terbagi menjadi tiga sub tema utama yaitu Kebijakan, Kriteria Kuota, dan Koordinasi Internal. Visualisasi *hierarchy chart* memperlihatkan bahwa aspek kebijakan menempati posisi dominan, disusul koordinasi internal, sementara kriteria kuota memiliki intensitas pembahasan terendah. Temuan ini menunjukkan bahwa perencanaan di sekolah lebih berfokus pada arah kebijakan dan pola koordinasi antar pihak dibandingkan aspek teknis penerimaan.

Kepala sekolah menyampaikan “Penerimaan PDPD, kita kembali lagi ke aturan pemerintah atau aturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bahwasanya, hak peserta didik mempunyai hak yang sama di sekolah yang umum” (REC/W/KS/3/7/25). Meskipun ada komitmen terhadap inklusivitas, sekolah belum memiliki pedoman tertulis atau Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus yang mengatur mekanisme penerimaan PDPD. Hal ini diperkuat oleh pernyataan panitia SPMB, “SOP nya ini sebetulnya tidak ada secara tertulis, karena untuk penerimaan ini kan kami menyamaratakan dengan adanya asesmen awal. Jadi, SOP untuk disabilitas masih belum ada” (REC/W/P1/4/7/25). Catatan hasil observasi dan dokumentasi memperkuat temuan ini, bahwasanya SOP penerimaan khusus PDPD belum tersedia, sekolah masih mengandalkan SOP umum SPMB. Padahal, menurut Imron (2023) sekolah harus memiliki prosedur kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Peristiwa ini membuktikan bahwa sekolah masih berpedoman pada regulasi pusat tanpa melakukan adaptasi terhadap kondisi dan kebutuhan spesifik sekolah.

Aspek kriteria kuota pada tahap penerimaan PDPD di SMKS Mahardhika Surabaya belum memiliki ketentuan khusus. Kepala sekolah menyatakan “Untuk kuota khusus PDPD, belum kita tentukan. Kita tidak membuat sebuah pagu, berapa anak yang diterima. Kita tetap terima, tapi tetap ada tahapannya sampai calon PDPD tersebut memang sudah siap

untuk sekolah di sini” (REC/W/KS/3/7/25). Pernyataan tersebut diperkuat oleh tanggapan dari panitia, *“Dalam penerimaan PDPD kami tidak memiliki kuota. Karena memang pada dasarnya kami sekolah awalnya, sekolah reguler. Lalu memang lambat laun kan setidaknya kita bisa mengikuti perkembangan pendidikan dengan tagline kita menyediakan pendidikan inklusif di sekolah”* (REC/W/P1/4/7/25). Hasil dokumentasi mendukung temuan tersebut. Berdasarkan Formulir Pendaftaran SPMB, diketahui bahwa format administrasi masih bersifat umum tanpa kolom khusus untuk mendaftarkan kebutuhan calon PDPD. Sebaliknya, dalam teori manajemen peserta didik menurut Suwardi & Daryanto (2017) fungsi perencanaan idealnya mencakup penetapan kuota dan potensi peserta didik. Hal ini menandakan bahwa sistem penerimaan di SMKS Mahardhika Surabaya masih berorientasi pada pendekatan umum dan belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip inklusif secara administratif.

Koordinasi internal dalam perencanaan penerimaan PDPD di SMKS Mahardhika Surabaya melibatkan berbagai unsur sekolah, terutama kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru BK, dan guru kejuruan. Panitia menyebut *“Untuk penyusunan ini ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator dan tim BK, dan juga beberapa guru kejuruan. Karena kalau berbicara tentang melayani PDPD ini, memang yang paling tahu ya beliau-beliau ini”* (REC/W/P1/4/7/25). Namun, terdapat temuan dari hasil wawancara dengan guru reguler yang menyatakan *“kalau koordinasi antara guru dan panitia pasti. Melalui rapat umum, pembahasannya umum, tidak terkhusus untuk PDPD”* (REC/W/GR1/4/7/25). Catatan observasi menunjukkan bahwa komunikasi antara panitia dan guru berjalan secara informal saat proses SPMB berlangsung. Guru reguler memperoleh informasi dari panitia dan guru BK mengenai karakteristik PDPD yang akan diterima, meski belum ada mekanisme koordinasi khusus. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil dokumentasi berupa notulen rapat koordinasi panitia SPMB. Rapat berfokus pada agenda teknis seperti promosi, penetapan biaya pendaftaran, penyusunan brosur, dan jadwal kegiatan. Tidak ditemukan pembahasan mengenai penerimaan atau pendampingan PDPD. Sementara itu, Rismila (2020) menyebutkan bahwa rapat internal idealnya membahas secara keseluruhan komponen yang akan dilaksanakan. Hal ini mengindikasikan bahwa proses perencanaan di sekolah masih berfokus pada aspek teknis administratif, sementara aspek inklusivitas bagi PDPD belum terintegrasi dalam mekanisme koordinasi internal.

Pengorganisasian (*Organizing*)

Aspek pengorganisasian dalam penerimaan PDPD di SMKS Mahardhika Surabaya mencakup tiga elemen utama, yaitu susunan panitia, pembagian tugas, serta tim khusus dan tenaga ahli. Pengorganisasian kegiatan SPMB di sekolah lebih menitikberatkan pada pelaksanaan teknis di lapangan dibandingkan pada perumusan struktur formal atau penetapan tim ahli.

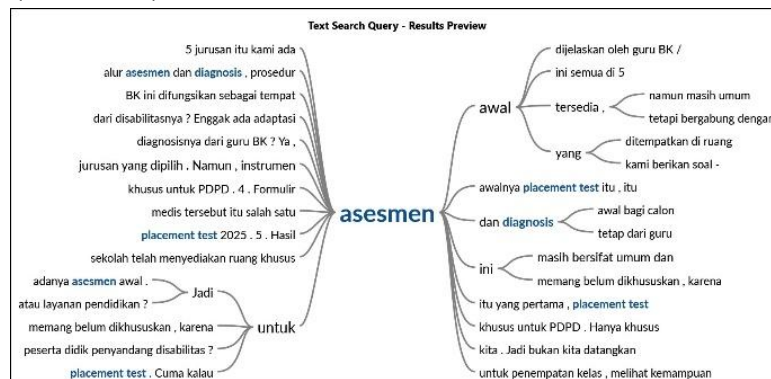
Pembentukan panitia SPMB di SMKS Mahardhika Surabaya melibatkan unsur pimpinan dan tenaga pendidik yang berperan langsung dalam proses seleksi calon peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara, struktur panitia umumnya terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru BK, serta guru kejuruan. *“untuk penyusunan ini ada; kepala sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator dan tim BK, dan juga ada beberapa guru*

kejuruan” (REC/W/P1/4/7/25). Berdasarkan studi dokumentasi, susunan panitia SPMB secara umum terdiri dari ketua unit, ketua bidang, serta beberapa seksi, di antaranya *marketing*, informasi dan pelayanan, serta data *center*. Namun, panitia yang telah terbentuk belum disertai dengan Surat Keputusan (SK). Sedangkan dalam teori manajemen pendidikan, Imron (2023) menjelaskan bahwa susunan panitia diformalkan melalui SK kepala sekolah. Ketiadaan SK ini menunjukkan bahwa proses pengorganisasian panitia masih bersifat administratif sederhana, tanpa mekanisme legal yang mengikat pelaksanaan maupun evaluasi kinerja panitia secara formal.

Pembagian tugas masih bersifat informal dan berpusat pada peran guru Bimbingan Konseling (BK). Guru BK menjadi pihak utama yang menangani calon PDPD sejak tahap wawancara hingga penentuan penempatan, ia menyatakan “*saya guru BK yang juga terlibat di panitia, jika ada calon PDPD yang mendaftar, langsung saya wawancara awal mengenai minat anak, didampingi oleh guru kejuruan. Hasilnya nanti kami konfirmasi lagi ke waka*” (REC/W/P1/4/7/25). Pembagian tugas lintas seksi seperti *marketing*, informasi dan pelayanan, serta data *center* tidak memiliki porsi tanggung jawab yang spesifik terhadap penerimaan PDPD. Berdasarkan observasi dan dokumentasi, belum terdapat pedoman atau pembagian tugas tertulis yang mengatur peran masing-masing individu dalam proses tersebut. Ketiadaan dokumen formal atau *job description* menyebabkan pembagian peran berjalan berdasarkan inisiatif dan koordinasi informal antar anggota. Padahal, Asidah et al. (2022) menjelaskan bahwa pembagian tugas harus disampaikan dengan rinci sesuai dengan bidangnya. Hal tersebut menunjukkan kesenjangan antara teori dengan praktik lapangan, di mana sekolah masih fokus pada kolaborasi lintas bidang, dibandingkan dengan porsi tugas masing-masing.

Proses penerimaan PDPD di SMKS Mahardhika Surabaya belum memiliki tim khusus maupun pelibatan tenaga ahli secara langsung. Panitia SPMB sekaligus guru BK menyebutkan “*Kami belum melibatkan tenaga ahli. Kami hanya menerima trackrecord dari tenaga ahli yang menjadi pertimbangan dalam penjurangan*” (REC/W/P1/4/7/25). Hal tersebut didukung kuat oleh hasil observasi dan dokumentasi, struktur panitia SPMB juga tidak mencantumkan pembentukan tim khusus yang menangani PDPD. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip inklusif sekolah masih terbatas pada tahap administratif, belum menyentuh aspek kolaborasi lintas profesi yang ideal dalam penerimaan PDPD. Padahal menurut teori fungsi pengorganisasian Aquinas (2008), struktur organisasi merupakan susunan formal yang menjelaskan bagaimana tugas-tugas kerja dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan dalam suatu organisasi. Struktur ini menjadi dasar terbentuknya mekanisme kerja dan tanggung jawab jelas antar anggota organisasi. Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa pengorganisasian masih bersifat sederhana, sehingga belum mencerminkan kolaborasi lintas profesi.

Pelaksanaan (*Actuating*)



Gambar 2. Text Search Query Pelaksanaan SPMB

Tahap pelaksanaan dalam proses penerimaan PDPD di SMKS Mahardhika Surabaya mencakup tiga aspek utama yaitu sosialisasi; penjangkaran; serta ketersediaan sarana dan prasarana. Visualisasi hasil analisis melalui *tree map* memperlihatkan bahwa tema asesmen mendominasi keseluruhan tahap pelaksanaan. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas utama sekolah berpusat pada proses identifikasi awal calon PDPD melalui wawancara, *placement test*, dan diagnosis hasil.

Tahap sosialisasi belum dilaksanakan secara khusus. Kepala sekolah menyatakan “Tidak ada bentuk sosialisasi yang spesifik menyebutkan jika sekolah menerima PDPD. Tapi tetap kita layani kalau memang ada pihak calon siswa atau orang tua ingin bersekolah di sini. Tapi itu tadi ada tahapan komunikasi” (REC/W/KS/3/7/25). Pandangan serupa disampaikan oleh panitia SPMB “Kami memang belum ada sosialisasi secara khusus untuk penerimaan PDPD. Tapi karena kami sudah menerima, jadinya dari mulut ke mulut begitu” (REC/W/P1/4/7/25). Dengan demikian, proses sosialisasi bersifat pasif dan berbasis pada pengalaman langsung calon PDPD sebelumnya, bukan strategi komunikasi yang terencana. Berdasarkan hasil dokumentasi berupa pamflet SPMB, diketahui bahwa materi sosialisasi berfokus pada program keahlian, kegiatan ekstrakurikuler, serta jadwal pendaftaran, tanpa mencantumkan informasi mengenai layanan bagi calon PDPD. Anam (2024) mengungkapkan bahwa dalam beberapa lembaga pendidikan inklusif telah dilakukan sosialisasi aktif dan terencana sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap layanan inklusi. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah yang belum menyusun strategi komunikasi khusus berada di posisi yang tertinggal dibandingkan praktik inklusi yang lebih proaktif.

Tahap penjangkaran mencakup proses asesmen awal dan diagnosis hasil sebagai dasar pengambilan keputusan penerimaan dan penempatan jurusan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, tahap ini dilaksanakan melalui tiga langkah utama, yakni identifikasi awal, *placement test*, dan penentuan hasil diagnosis. Pada tahap identifikasi awal, sekolah melakukan komunikasi intensif dengan orang tua calon PDPD untuk menggali potensi, kebutuhan, serta kondisi calon PDPD. Guru BK berperan penting dalam proses ini, dengan melakukan wawancara awal didampingi guru kejuruan. Panitia dengan latar belakang guru BK menjelaskan “Langsung saya ajak wawancara awal, didampingi oleh guru kejuruan, biasanya saya tanya anaknya minat ke mana, kesulitannya apa. Terus nanti melihat potensi juga, kemampuan dari pertanyaan-pertanyaan mendasar,

berarti harus dipetakan anak-anak ini dan sebagainya itu” (REC/W/P1/4/7/25). Pengalaman ini juga diakui oleh wali yang menyebutkan *“Ada wawancara dengan guru BK tentang kondisi, kebutuhan, dan minat anak untuk bahan pertimbangan saat penerimaan.”* (REC/W/W/24/7/25). Temuan ini didukung oleh pernyataan Aristu & Supriyanto (2024) yang menyebutkan bahwa identifikasi awal dilakukan dalam rangka memperoleh pemahaman mengenai kebutuhan belajar calon PDPD. Hal ini menjadi bukti komprehensif bahwa sekolah sudah melakukan praktik inklusif sebelum menerima PDPD.

Tahap berikutnya adalah *placement test*, yang digunakan sebagai dasar pengelompokan dan penentuan jurusan. Tes ini berisi soal kemampuan umum, penalaran, serta tes kejuruan sesuai program yang dipilih. Namun, seluruh responden menegaskan bahwa tes tersebut masih bersifat umum tanpa adanya adaptasi khusus bagi calon PDPD. Panitia menjelaskan *“Untuk asesmen ini memang belum dikhususkan, karena untuk asesmen awal yang kami berikan soal-soal itu hanya dari tingkat SMP. Jadi kalau misalkan dikhususkan masih belum ada soal khusus untuk PDPD”* (REC/W/P1/4/7/25). Hasil observasi menunjukkan bahwa formulir *placement test* yang digunakan sama untuk seluruh peserta, tanpa adanya penyesuaian. Aristu & Supriyanto (2024) mendukung temuan ini, dalam penelitiannya dijelaskan bahwa asesmen awal dilakukan sebagai dasar pemberian layanan pendidikan yang relevan dengan karakteristik dan kebutuhan PDPD. Namun, Hasanah et al. (2025) asesmen awal dilakukan untuk merancang program pembelajaran yang relevan dan mendukung pertumbuhan optimal pada setiap PDPD. Artinya, penyusunan asesmen awal harus didasarkan oleh kemampuan individual PDPD, sedangkan sekolah belum memenuhi hal tersebut. Maka dari itu, dibutuhkan adaptasi asesmen awal bagi PDPD sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Tahap diagnosis hasil dilakukan dengan mempertimbangkan hasil tes, wawancara orang tua, dan diskusi dengan guru. Penentuan jurusan dilakukan melalui koordinasi antara guru BK, waka kurikulum, dan guru kejuruan. *“Jadi untuk penempatan jurusan didasarkan dari potensi siswa, hasil wawancara orang tua, dan hasil placement test. Kalau yang menetapkan, kami waka, guru BK, dan guru kejuruan”* (REC/W/P2/24/7/25). Wawancara dengan wali PDPD juga memperkuat pernyataan tersebut, *“Kalau menurut saya sih belum, tapi sudah ada kemiripan. Soalnya anaknya ini lebih ke kecantikan sebenarnya. Cuman kemarin waktu pendaftarannya itu yang paling mendekati sama bakatnya ini DKV, jadinya masuk ke DKV”* (REC/W/W/24/7/25). Kemudian diperkuat kembali oleh pernyataan PDPD *“Sebenarnya aku suka make up, tapi di sekolah ini gaada jurusan kecantikan, jadi yang paling nyambung DKV”* (REC/W/PDPD/24/7/25).

Tabel 1. Daftar Kebutuhan PDPD SMKS Mahardhika Surabaya

No.	Nama PDPD	Kelas	Nilai PT	Kebutuhan PDPD
1	AFM	DKV 1	76	1. Model pembelajaran dengan media sekolah
2	ARA	Animasi	75	2. Penggunaan informasi tertulis
3	AMT	DKV 1	64	1. Model pembelajaran dengan pendekatan individual
4	CF	DKV 2	71	
5	DSW	MP2	75	2. Rentang waktu belajar lebih lama

Dokumentasi sekolah menunjukkan adanya daftar PDPD beserta kebutuhan pembelajarannya. Namun, daftar tersebut belum berbentuk diagnosis formal, melainkan

catatan administratif internal yang belum sepenuhnya memenuhi standar asesmen inklusif. Setiawan & Setyowati (2020) menyebutkan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan identifikasi dan asesmen awal, seperti; tim khusus harus dibentuk sekolah yang melibatkan seluruh komponen sekolah; tim harus didukung oleh tenaga profesional; hasil identifikasi dan asesmen awal digunakan sebagai dasar penyusunan dan pengembangan layanan pendidikan. Hal ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara teori dan praktik lapangan mengenai pelayanan ideal sekolah terhadap calon PDPD.

Pengawasan (*Controlling*)

Tabel 2. *Matrix Coding Query* Tema "Pengawasan"

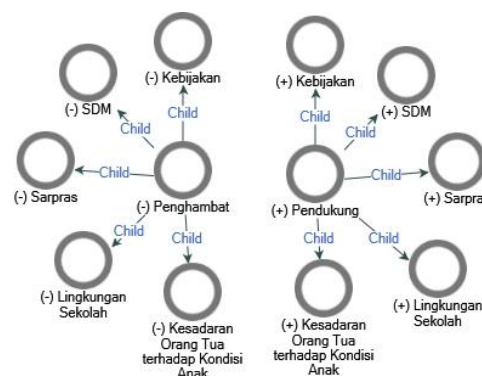
Subjek	a. Monitoring dan Evaluasi	b. Perbaikan
1. KS	5	4
2. P1	1	1
3. P2	0	0
4. BK1	1	0
5. BK2	0	0
6. GR1	0	0
7. GR2	0	0
8. W	0	0
9. PDPD	0	0

Berdasarkan hasil *Matrix Coding Query*, tema pengawasan hanya muncul pada tiga sumber utama, yaitu Kepala Sekolah, Panitia, dan Guru BK. Temuan ini menunjukkan bahwa proses monitoring dan evaluasi dalam penerimaan PDPD masih banyak dikendalikan oleh pihak manajemen inti, tanpa pelibatan langsung dari guru reguler, orang tua/wali, maupun PDPD. Fungsi pengawasan berpusat pada tataran struktural sekolah dan belum melembaga sebagai mekanisme formal yang sistematis.

Pengawasan dalam penerimaan PDPD di SMKS Mahardhika Surabaya belum dilaksanakan melalui mekanisme formal, melainkan melalui refleksi pengalaman dan evaluasi internal pasca pelaksanaan SPMB. Evaluasi ini dilakukan oleh panitia dan kepala sekolah untuk meninjau kembali proses, kendala, dan hasil penerimaan yang telah berlangsung. Seperti hal tidak tersedianya SOP khusus. Panitia menyampaikan, "*Rencana penyusunan SOP kemungkinan ada, karena kami kan juga ikut melihat perkembangan, kami evaluasi, kemungkinan ada untuk di tahun depan*" (REC/W/P1/4/7/25). Sejalan dengan hal tersebut, kepala sekolah juga menyatakan, "*Kalau di sini mungkin yang perlu kita siapkan yang pertama itu penguatan atau meningkatkan kemampuan guru dalam pemahaman tentang penanganan PDPD. Kemudian yang kedua meningkatkan membuat semacam aturan dan perlunya ada evaluasi dari tahun ke tahun mungkin kita bisa siapkan di tahun berikutnya*" (REC/W/KS/3/7/25). Pernyataan tersebut menegaskan bahwa evaluasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara kebijakan penerimaan dengan kemampuan sekolah dalam menyediakan layanan yang adaptif bagi calon PDPD. Meskipun tidak terdokumentasi secara resmi, hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan pada tahun berikutnya, baik dalam aspek sarana, mekanisme asesmen, maupun kesiapan guru.

Hasil observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa pengawasan lebih berfokus pada kesadaran internal sekolah untuk memperbaiki hal-hal yang dirasa belum optimal, seperti ketiadaan SOP khusus, keterbatasan instrumen asesmen inklusif, dan minimnya tenaga ahli pendidikan khusus yang terlibat. Bentuk pengawasan ini mencerminkan adanya upaya adaptif sekolah dalam memperkuat pelaksanaan SPMB agar lebih inklusif. Temuan ini selaras dengan hasil penelitian Utari et al. (2025) yang mengungkapkan bahwa evaluasi pendidikan inklusif di sekolah umum masih dilakukan secara informal tanpa dokumentasi baku. Padahal, teori pengawasan pendidikan menurut Marhawati (2018) menekankan pentingnya mengetahui kendala yang muncul dan kemudian digunakan sebagai dasar perbaikan. Dengan demikian, pengawasan di SMKS Mahardhika Surabaya masih bersifat reflektif, belum mencapai tahap sistematis dan berbasis indikator kinerja inklusif.

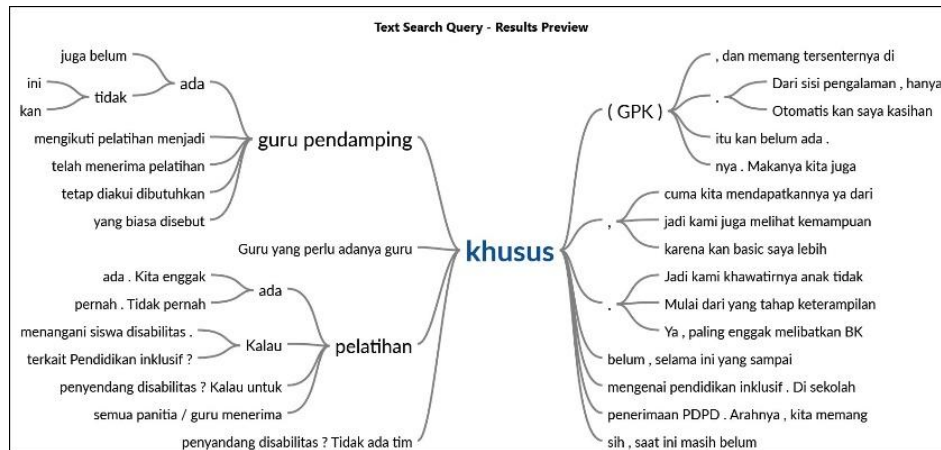
Faktor yang Mempengaruhi Manajemen SPMB bagi PDPD



Gambar 3. Faktor Pendukung dan Penghambat

Project map di atas menyajikan faktor pendukung dan penghambat manajemen SPMB bagi PDPD di SMKS Mahardhika Surabaya. Kedua faktor mencakup kebijakan, SDM, sarana dan prasarana, lingkungan dan kesadaran orang tua terhadap kondisi PDPD. Disisi kanan dengan simbol (+) mewakili faktor pendukung, sedangkan di sisi kiri dengan simbol (-) mewakili faktor penghambat.

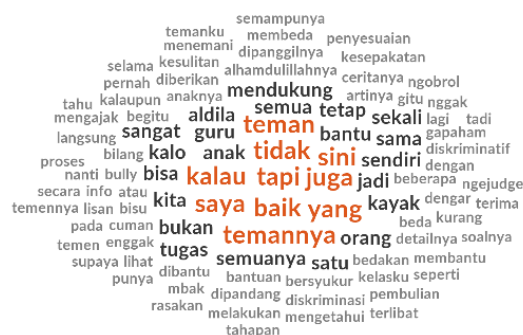
Kebijakan inklusi di sekolah masih bersifat umum dan belum terimplementasi secara teknis. Komitmen sekolah dalam menyesuaikan diri dengan arah kebijakan nasional tentang pendidikan inklusif merupakan bentuk dukungan positif. Panitia menyebut bahwa “sekolah berupaya mengikuti perkembangan pendidikan dengan mengusung semangat menyediakan layanan inklusif meskipun awalnya merupakan sekolah reguler” (REC/W/P1/4/7/25). Di sisi lain, belum adanya kebijakan operasional khusus juga menjadi kendala utama dalam penerapannya. Kepala sekolah dan panitia menyatakan bahwa sekolah belum memiliki aturan tertulis terkait penerimaan PDPD secara spesifik. Prosedur yang digunakan masih mengacu pada mekanisme umum SPMB. Selain itu, dokumen pendukung seperti notulen rapat belum menyinggung aspek inklusif secara eksplisit.



Gambar 4. Topik Dominan dalam Tema SDM

Word tree kata “khusus” menggambarkan bahwa topik dominan berkaitan dengan ketiadaan GPK dan pelatihan khusus bagi panitia maupun guru. Cabang kata menunjukkan bahwa guru dan panitia mengakui kebutuhan akan tenaga pendamping, namun sekolah masih bergantung pada pengalaman individu tanpa dukungan pelatihan formal. Dari hasil wawancara dan dokumentasi, aspek sumber daya manusia (SDM) dalam penerimaan PDPD di SMKS Mahardhika Surabaya didominasi oleh keterbatasan. Guru dan panitia belum menerima pelatihan khusus, belum tersedia GPK, dan belum melibatkan tenaga ahli eksternal. Meskipun demikian, faktor pendukung tampak dari keberadaan satu guru BK yang telah mengikuti pelatihan GPK dan berperan sebagai guru rujukan utama dalam asesmen maupun pendampingan calon PDPD.

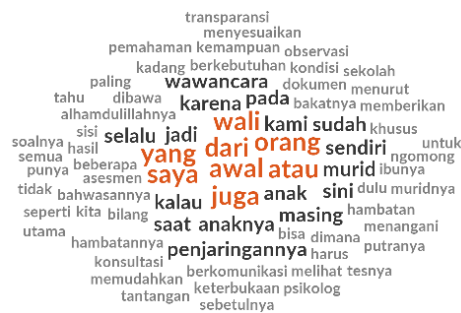
Secara keseluruhan, sarana dan prasarana di SMKS Mahardhika Surabaya dinilai cukup mendukung pelaksanaan asesmen awal, meskipun masih bersifat umum. Ruang BK difungsikan secara fleksibel sebagai ruang asesmen saat penerimaan calon PDPD dan dilengkapi dengan akses ramp sederhana menuju ruangan tersebut. Namun, sekolah belum memiliki fasilitas pendukung khusus seperti jalur pemandu, alat bantu komunikasi, atau ruang asesmen permanen yang dirancang untuk kebutuhan PDPD.



Gambar 5. Kata Dominan dalam Tema Lingkungan Sekolah

Hasil analisis *word cloud* menunjukkan bahwa faktor lingkungan sekolah dan kesadaran orang tua menjadi aspek penting yang mempengaruhi keberhasilan penerimaan PDPD di SMKS Mahardhika Surabaya. Gambar memperlihatkan dominasi kata “teman”, “baik”, dan “guru” yang merepresentasikan lingkungan sekolah yang cenderung suportif. Lingkungan sekolah menunjukkan iklim positif dan inklusif dimulai dari kepala sekolah yang menyatakan bahwa yayasan mendukung penerimaan PDPD dengan prinsip kesetaraan.

guru BK dan guru reguler juga menyatakan interaksi peserta didik reguler dan PDPD tidak ditemukan perilaku diskriminatif, dan wali PDPD yang menyatakan bahwa anaknya merasa diterima dengan baik oleh guru dan teman-temannya, serta PDPD sendiri yang menuturkan bahwa guru siap membantu ketika ia mengalami kesulitan. Tetapi, PDPD juga mengungkapkan bahwa masih ada temannya yang kurang memahami istilah yang tepat mengenai disabilitas, menunjukkan perlunya peningkatan literasi inklusif di lingkungan sekolah.



Gambar 6. Kata Dominan dalam Tema Kesadaran Orang Tua

Gambar di samping menyoroti kata “wali”, “orang tua”, dan “awal” yang menggambarkan pentingnya keterbukaan orang tua pada tahap penjaringan awal. Guru BK dan panitia menyampaikan bahwa orang tua telah menyampaikan hasil asesmen psikolog atau rekam medis sejak awal, sehingga memudahkan sekolah dalam proses identifikasi dan penentuan kebutuhan PDPD. Namun, beberapa orang tua masih kurang terbuka mengenai kondisi anaknya, yang kemudian menghambat kesiapan sekolah dalam menyesuaikan layanan pembelajaran. Kepala sekolah menilai bahwa variasi tingkat pemahaman dan keterbukaan orang tua menjadi tantangan dalam memastikan proses penerimaan berjalan efektif.

Temuan ini mendukung pandangan Somad et al. (2024) bahwa keberhasilan implementasi pendidikan inklusif di Indonesia sangat bergantung pada kompetensi guru, keberadaan infrastruktur yang memadai, dukungan kebijakan sekolah, serta partisipasi orang tua. Ketiadaan GPK dan pedoman tertulis khusus menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik lapangan. Dalam perspektif manajemen pendidikan inklusif, faktor SDM dan sarana prasarana menjadi determinan utama keberhasilan manajemen peserta didik inklusif. Sehingga, dapat diketahui bahwa SMKS Mahardhika Surabaya telah melakukan praktik inklusif didukung oleh komitmen sekolah dalam menyelaraskan kebijakan pendidikan inklusi pada sekolah reguler, tersedianya seorang guru yang memiliki kompetensi pendidikan inklusif, memprioritaskan keselarasan antara kondisi sekolah dengan kebutuhan calon PDPD, dan lingkungan sekolah yang mendukung adanya PDPD. Namun, terdapat beberapa faktor yang menghambat seperti, belum adanya aturan tertulis khusus penerimaan PDPD, belum tersedia GPK, masih terdapat kesalahan dalam pengistilahan disabilitas, belum melakukan kolaborasi lintas profesi, belum tersedia asesmen awal yang adaptif, dan transparansi orang tua berkaitan dengan kondisi anak masih rendah.

D. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen dalam SPMB bagi PDPD di SMKS Mahardhika Surabaya masih berada pada tahap pemenuhan kebijakan dasar dan belum sepenuhnya mencapai perencanaan yang adaptif terhadap prinsip pendidikan inklusif. Pada tahap perencanaan, sekolah telah membuka akses bagi PDPD namun belum memiliki pedoman tertulis, kriteria dan kuota khusus, serta belum ada diskusi yang membahas rancangan penerimaan PDPD. Pada pengorganisasian menunjukkan adanya pelibatan dari berbagai stakeholder mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru BK, dan guru kejuruan, namun tanpa SK dan pembagian tugas secara formal. Pelaksanaan SPMB telah dilakukan melalui tahapan sosialisasi, identifikasi, asesmen awal, dan diagnosis tetapi instrumen yang digunakan masih bersifat umum dan belum disesuaikan dengan kebutuhan PDPD. Sementara pada tahap pengawasan, evaluasi dilaksanakan secara reflektif berdasarkan pengalaman, tanpa mekanisme formal yang terdokumentasi.

Faktor pendukung utama meliputi komitmen pimpinan sekolah, dukungan guru BK yang telah memiliki bekal kompetensi GPK, serta lingkungan sekolah yang inklusif. Sedangkan faktor penghambat mencakup ketiadaan regulasi afirmatif, keterbatasan SDM dengan kompetensi inklusif, belum tersedianya instrumen asesmen adaptif, dan minimnya kesadaran sebagian orang tua mengenai kondisi PDPD. Secara umum, sekolah telah menunjukkan niat dan langkah awal menuju praktik penerimaan inklusif, namun masih memerlukan penguatan kebijakan, peningkatan kompetensi guru, serta penyusunan SOP yang komprehensif agar implementasi SPMB lebih sistematis dan berkeadilan bagi seluruh calon peserta didik.

Daftar Pustaka

- Al-Nur, W. R. (2023). Strategi Penerimaan Peserta didik Baru Pada Sekolah Inklusi di School Of Human Jatisampurna Bekasi. *Strategi Penerimaan Siswa Baru Pada Sekolah Inklusi Di School of Human Jatisampurna Bekasi*, 9(1), 29–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.47776/mozaic.v9i1.675>
- Anam, R. K. (2024). Growing Public Concern Towards The Implementation Of Inclusive Education. *Action Research Journal Indonesia*, 6(3), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.61227/arji.v6i3.185>
- Aquinas. (2008). *Organization Structure and Design: Applications and Challenges* (1st ed.). Excel Book.
- Aristu, J. J., & Supriyanto. (2024). Implelementasi Program Kompensatoris Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) dalam Pemenuhan Akomodasi yang Layak di Sekolah Menengah Pertama Negeri 28 Surabaya. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 12(2), 483–496.
- Asidah, N., Zahratunnisa, F., Rosyidah, I., & Putri, D. R. (2022). Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Masa Pandemi Covid-19 di SMP Negeri 1 Sangatta Utara. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 2(3), 110–118. <https://doi.org/https://doi.org/10.37329/metta.v2i3.1736>
- Bazeley, P., & K. Jackson. (2015). Qualitative Data Analysis with NVivo. *Qualitative Research in Psychology*, 12(4), 492–494. <https://doi.org/10.1080/14780887.2014.992750>
- Creswell, J., & Poth, C. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches - John W. Creswell, Cheryl N. Poth - Google Buku* (Pearson Chelsea (ed.); fourth Edi). SAGE Publicatoin.
- Hasanah, I. M., Puspitasari, W. P., Husnah, F. M., Rahmiati, & Meilani, S. F. (2025). Assesmen Awal berdasarkan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 5(2), 1385–1391. <https://doi.org/https://doi.org/10.37081/jipdas.v5i2.2832>
- Imron, A. (2023). *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*. Bumi Aksara.
- Juntak, J. N. S., Rynaldi, A., Sukmawati, E., Arafah, M., & Sukomardojo, T. (2023). Mewujudkan Pendidikan Untuk Semua: Studi Implementasi Pendidikan Inklusif di Indonesia. *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 5(2), 205–214. <https://doi.org/10.15575/jbpd.v5i2.26904>
- Kemendikbudristek. (2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan . *Kemendikbudristek*, 1–32.
- Lincoln, Yvonna S. & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. SAGE Publications.
- Marhawati, B. (2018). *Pengantar Pengawasan Pendidikan* (1st ed.). Deepublish.
- Nurrachman, R. I., & Nugroho, A. (2022). Kendala Pengawasan Dinas Provinsi Jawa Timur Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di SMA Kota Surabaya. *E-Journal Unesa*, 1.
- Pusat, P. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. *BPK RI*, 4(June), 2016.

- Rismila, S. (2020). *Manajemen Penerimaan Siswa Baru Berbasis Daring di SMK Darussalam Karangpucung Cilacap*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Setiawan, A. D., & Setyowati, R. N. (2020). Pemenuhan Hak Peserta Didik Penyandang Disabilitas di SMA Negeri 4 Sidoarjo (Studi Akses Pendidikan Program Sekolah Inklusi). *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 08(02), 337–351. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraan/article/view/34713/30863>
- Somad, A., Haryanto, S., & Darsinah. (2024). Inclusive Education for Special Needs Students in Indonesia: A Review of Policies, Practices and Challenges. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, 9(2), 1024–1035. <https://doi.org/10.31851/jmksp.v9i2.16192>
- Suwardi, & Daryanto. (2017). *Manajemen Peserta Didik*.
- UNESCO. (2023). *Recommendation on Education for Peace and Human Rights, International Understanding, Cooperation, Fundamental Freedoms, Global Citizenship and Sustainable Development*.
- Utari, D. S., Matridi, R. A., Nengsih, N. S., & Rumduni, S. (2025). *Evaluasi Atas Pelayanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Di Kabupaten bintang (Studi Di SMP Negeri 2 Bintan) Ilmu Pemerintahan , STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang*. 6, 171–187.
- WHO, W. H. O. (2023). *Disability*.
- Wiratrianida, S., & Sujarwanto. (2024). Pengelolaan Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik Disabilitas (Studi Kasus Di SMKN 3 Probolinggo). *Jurnal Pendidikan Khusus*, 19.
- Yin, R. (2009). *Case Study Research: Design and Methods* (L. Habib (ed.)). SAGE .
- Zakiah, Z. (2021). Sikap Guru Terhadap Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan di Kabupaten Sidoarjo. *Special and Inclusive Education Journal*, 2(2), 84–95. <https://doi.org/10.36456/special.vol2.no2.a4572>